

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

JL. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam Bandara Int SMB II Palembang - 30961 TELP: 0711 - 571681

4 : bptd sumsel

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN NOMOR: SK-BPTD SUMSEL 12 Tahun 2029

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN **BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT** KELAS II SUMATERA SELATAN **TAHUN 2024**

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN **TAHUN ANGGARAN 2024**

Menimbang

- : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan adanya perubahan nomenklatur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023, maka perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineria Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024

PERTAMA

: Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

KEDUA

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/outcome yang digunakan oleh masingmasing Sub Bagian dan Seksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan untuk menetapkan:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

KETIGA

: Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT

Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

KELIMA

- Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
- b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Sub Bagian dan Seksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

KEENAM

: Hasil penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

KETUJUH

- : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas, Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan; Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

KEDELAPAN

: Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : PALEMBANG Pada tanggal : **4** Januari 2024

> > Balai Pengelola Transportasi Darat Yumatera Selatan

enn Mhels Adlan, S.T.,M.M. NIP. 1990205 200604 1 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

KELAS II SUMA



Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan Nomor : 5k-Bpto sumset (2 Tahun 2004 Tanggal : 4 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN **TAHUN 2024**

	PRO	OGRAM	
	TIVITAS		
	KEG	GIATAN	
	INFRASTRUKTUR KONEKT	IVITAS TRA	NSPORTASI DARAT
	SASARAN KEGIATAN	IND	IKATOR KINERJA KEGIATAN
SK 1	Meningkatnya Konektivitas	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan
	Transportasi Darat dan		Pelayanan Keperintisan
	Keterpaduan Antarmoda		Angkutan Jalan Nasional
	Transportasi		
DEFI	NISI		
Perser	ntase Pelaksanaan Pelayanan Kepe	rintisan An	gkutan Jalan Nasional adalah
perba	dingan antara jumlah rit angkutan	perintis di	jalan dengan jumlah target rit
pada	tahun (n).		
	BER DATA		
BALA	I PENGELOLA TRANSPORTASI DAI	RAT KELAS	II SUMATERA SELATAN
CARA	MENGHITUNG		
	$IKK1.1 = \frac{Jumlah\ realis}{Jumlah\ targ}$	asi rit pada tahi	$\frac{un(n)}{2}$ x100%
	Jumlah targ	et rit pada tahui	n(n)
			- (-7
RIT ada	lah satu kali perjalanan dari tempat asal ke te	mpat tujuan at	
RIT ada		mpat tujuan at	
SATU		mpat tujuan at	
SATU % (per	AN	mpat tujuan at	

	PROC	GRAM		
	KEG	ATAN		
	INFRASTRUKTUR KONEKTIV	TAS TRA	NSPORTASI DARA	T
	SASARAN KEGIATAN	INDI	KATOR KINERJA	KEGIATAN
SK 1	Meningkatnya Konektivitas	IKK 1.3	Jumlah Termina	Tipe-A dan
	Transportasi Darat dan		Terminal Barang	yang
	Keterpaduan Antarmoda		Beroperasi	
	Transportasi			
DEFIN	NISI			
Dikelo	nal Tipe-A yang Beroperasi Merupak gun dan telah beroperasi. Terminal 7 ola oleh Direktorat Jenderal Perhubu	Րipe-A ada ıngan Dar	lah Terminal Tipe at, sedangkan Ter	-A yang minal Barang
Dikelo yang I Telah jumla	gun dan telah beroperasi. Terminal	Fipe-A ada ingan Dar ang yang ' . Jumlah	lah Terminal Tipe at, sedangkan Ter Telah Selesai Diba terminal yang dihi	-A yang minal Barang ngun dan tung hanya
Dikelo yang I Telah jumla Suma SUME	gun dan telah beroperasi. Terminal dan deh Direktorat Jenderal Perhubu Beroperasi merupakan Terminal Bar Melayani Angkutan Barang di Jalan h terminal tipe A, dikarenakan tidak tera Selatan. BER DATA	Fipe-A ada Ingan Dar Pang yang ' I. Jumlah I terdapat	lah Terminal Tipe at, sedangkan Ter Telah Selesai Diba terminal yang dihi terminal barang d	-A yang minal Barang ngun dan itung hanya i Provinsi
Dikelo yang I Telah jumla Suma SUME	gun dan telah beroperasi. Terminal dela oleh Direktorat Jenderal Perhubu Beroperasi merupakan Terminal Bar Melayani Angkutan Barang di Jalan h terminal tipe A, dikarenakan tidak tera Selatan.	Fipe-A ada Ingan Dar Pang yang ' I. Jumlah I terdapat	lah Terminal Tipe at, sedangkan Ter Telah Selesai Diba terminal yang dihi terminal barang d	-A yang minal Barang ngun dan itung hanya i Provinsi
Dikelo yang I Telah jumla Suma SUME BALA CARA	gun dan telah beroperasi. Terminal dala oleh Direktorat Jenderal Perhubu Beroperasi merupakan Terminal Bar Melayani Angkutan Barang di Jalan h terminal tipe A, dikarenakan tidak tera Selatan. BER DATA I PENGELOLA TRANSPORTASI DAR MENGHITUNG	Fipe-A ada Ingan Dar Pang yang ' I. Jumlah I terdapat	lah Terminal Tipe at, sedangkan Ter Telah Selesai Diba terminal yang dihi terminal barang d	-A yang minal Barang ngun dan itung hanya i Provinsi
Dikelo yang I Telah jumla Suma SUME BALAI CARA	gun dan telah beroperasi. Terminal ola oleh Direktorat Jenderal Perhubu Beroperasi merupakan Terminal Bar Melayani Angkutan Barang di Jalan h terminal tipe A, dikarenakan tidak tera Selatan. BER DATA I PENGELOLA TRANSPORTASI DAR MENGHITUNG = Jumlah terminal tipe A yang beroperasi	Fipe-A ada Ingan Dar Pang yang ' I. Jumlah I terdapat	lah Terminal Tipe at, sedangkan Ter Telah Selesai Diba terminal yang dihi terminal barang d	-A yang minal Barang ngun dan itung hanya i Provinsi
Dikelo yang I Telah jumla Suma SUME BALAI CARA IKK 1.2	gun dan telah beroperasi. Terminal ola oleh Direktorat Jenderal Perhubu Beroperasi merupakan Terminal Bar Melayani Angkutan Barang di Jalan h terminal tipe A, dikarenakan tidak tera Selatan. BER DATA I PENGELOLA TRANSPORTASI DAR MENGHITUNG = Jumlah terminal tipe A yang beroperasi AN	Fipe-A ada Ingan Dar Pang yang ' I. Jumlah I terdapat	lah Terminal Tipe at, sedangkan Ter Telah Selesai Diba terminal yang dihi terminal barang d	-A yang minal Barang ngun dan itung hanya i Provinsi
Dikelo yang I Telah jumla Suma SUME BALAI CARA IKK 1.2 SATU Lokas	gun dan telah beroperasi. Terminal ola oleh Direktorat Jenderal Perhubu Beroperasi merupakan Terminal Bar Melayani Angkutan Barang di Jalan h terminal tipe A, dikarenakan tidak tera Selatan. BER DATA I PENGELOLA TRANSPORTASI DAR MENGHITUNG = Jumlah terminal tipe A yang beroperasi AN	Fipe-A ada Ingan Dar Pang yang ' I. Jumlah I terdapat	lah Terminal Tipe at, sedangkan Ter Telah Selesai Diba terminal yang dihi terminal barang d	-A yang minal Barang ngun dan itung hanya i Provinsi
Dikelo yang I Telah jumla Suma SUME BALAI CARA IKK 1.2 SATU Lokas PENA	gun dan telah beroperasi. Terminal ola oleh Direktorat Jenderal Perhubu Beroperasi merupakan Terminal Bar Melayani Angkutan Barang di Jalan h terminal tipe A, dikarenakan tidak tera Selatan. BER DATA I PENGELOLA TRANSPORTASI DAR MENGHITUNG = Jumlah terminal tipe A yang beroperasi AN	Tipe-A ada angan Dar ang yang ' Jumlah a terdapat	lah Terminal Tipe at, sedangkan Ter Telah Selesai Diba terminal yang dihi terminal barang d	-A yang minal Barang ngun dan tung hanya i Provinsi LATAN

	KEGIATAN					
	INFRASTRUKTUR KONEKTIV	TTAS TRA	NSPORTASI DARA	T		
	SASARAN KEGIATAN	INDI	KATOR KINERJA	KEGIATAN		
SK 1	Meningkatnya Konektivitas	IKK 1.6	Jumlah Pelabuh	an SDP yang		
	Transportasi Darat dan		Beroperasi			
	Keterpadua Antarmoda					
	Transportasi					
DEFIN						
Pelabu	ihan penyeberangan adalah pelabul	han laut y	yang digunakan u	ntuk angkutan		
penyel	berangan. Pelabuhan penyeberangar	n adalah P	elabuhan penyebe	rangan kelas I,		
kelas	II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabu	ıhan sung	gai dan danau ada	lah pelabuhan		
umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terus			an. Pelabuhan			
sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pe				Pelabuhan SDP		
yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui A				PBN.		
SUMB						
BALAI	PENGELOLA TRANSPORTASI DARA	AT KELAS	II SUMATERA SE	LATAN		
CARA MENGHITUNG						
IKK 1.6	IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)					
SATU	AN					
Lokas						
	NGGUNG JAWAB					
BALAI	PENGELOLA TRANSPORTASI DARA	AT KELAS	II SUMATERA SE	LATAN		

	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
	PELAYANAN TRA	NSPORTAS	SI DARAT		
	SASARAN KEGIATAN	IND	IKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	IKK 2.1	1		
	Transportasi Darat		Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A		
DEFIN	VISI				
Berda	sarkan PM 40 Tahun 2015 ten	tang Stan	dar Pelayanan Penyelenggaraan		
Termi	nal Angkutan Jalan, Standar Pelay	anan term	inal penumpang mencakup jenis		
	pelayanan keselamatan, (2)				
	ndalan/keteraturan, (4) pelay				
	dahan/keterjangkauan, dan (6) pel				
	ar Pelayanan Minimal (SPM) di				
	h keberadaan indikator jenis pelay				
	adaan indikator jenis pelayanan				
	in salah satu Terminal Tipe-A yan				
	tera Selatan yaitu Terminal Tipe A				
	BER DATA	india dina	, Desait		
	I PENGELOLA TRANSPORTASI DAI	PATKELAS	II SUMATERA SELATAN		
	MENGHITUNG	CAT RELAC	TI GOWINI DIGI GERMANI		
	Jumlah keheradaan indikator jenis nela	yanan di Term	inal Tipe A yang memenuhi SP		
IKF	$(2.1 = \frac{\text{Jumlah keberadaan indikator jenis pera}}{\text{Jumlah total keberadaan indikator jenis p}}$	elayanan di Te	rminal Tipe A yang memenuhi SP x 100%		
SATU	AN				
Perse	ntase (%)				
PENA	NGGUNG JAWAB				
BALA	I PENGELOLA TRANSPORTASI DAI	RAT KELAS	S II SUMATERA SELATAN		

PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS KEGIATAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A DEFINISI

Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A merupakan perbandingan antara persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan data operasional terminal secara *online* (bobot 50%) ditambah dengan persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang berada di Terminal Tipe A dapat berupa *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

SUMBER DATA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

CARA MENGHITUNG

 $Persentase\ TTA\ Online = \frac{Jumlah\ Terminal\ yang\ melaporkan\ operasional\ nya\ secara\ online}{Jumlah\ Total\ Terminal\ Beroperasi}x100\%$

IKK 2.2 = (Persentase TTA yang melaporkan data operasional online x 50%)
+ (Persentase jumlah TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi Terminal x 50%)

Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A (SMART):

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	Vending Machine	20%
2	passenger barrier gate	20%
3	vehicle barrier gate	20%
4	CCTV	10%
5	counting passenger	10%
6	information display	20%

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

	PROGRAM				
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
		KEGI	ATAN		
		PELAYANAN TRAN			
	SASARA	IN KEGIATAN	INDI	KATOR KINERJA	KEGIATAN
SK 2	0	nya Kinerja Pelayanan	IKK 2.3	1	
	Transporta	si Darat		Standar Pelayana (SPM) di Pelabuh	
DEFIN	IISI				
Stand	ar Pelayana	n Minimal (SPM) Pelabu	han Peny	eberangan diatur	melalui PM 39
Tahur	2015 tent	tang Standar Pelayana	n Penum	pang Angkutan F	enyeberangan.
Stand	ar Pelayana	n Penumpang di Pelabul	han Penye	berangan paling	sedikit meliputi
(1) ke	selamatan,	(2) keamanan, (3) keha	ndalan/k	eteraturan, (4) ke	nyamanan, (5)
kemud	kemudahan/keterjangkauan, (6) kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar				naan Standar
Pelaya	Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan pada pemenuhan				da pemenuhan
6 (ena	m) aspek p	elayanan di salah satu	Pelabuha	an SDP yang men	nenuhi SPM di
Provin	si Sumatera	Selatan yaitu Pelabuha	n Penyebe	erangan Tanjung A	pi-api.
SUMB	ER DATA				
BALAI	PENGELOL	A TRANSPORTASI DARA	AT KELAS	II SUMATERA SE	LATAN
CARA	MENGHITU	NG			
	$IKK 2.3 = \frac{jumlal}{i}$	h keberadaan pemenuhan aspek pe	layanan di pel	abuhan SDP yang memenu	thi SP x100%
SATIL	SATUAN SATUAN SATUAN				
	ntase (%)				
	NGGUNG JA	WAB			
		A TRANSPORTASI DARA	AT KELAS	II SUMATERA SE	LATAN

	TAS		
		IATAN	
	KESELAMATAN DAN KEAM		
	SASARAN KEGIATAN		OR KINERJA KEGIATAN
SK 4	Meningkatnya Kinerja	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan
	Pelayanan Transportasi Darat		Jalan yang Telah
			Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
DEFIN	I I I		Kondisi ideai
	ihan Perlengkapan Jalan dalam rar	ngka mewnind	kan keamanan keselamatan
	ban, dan kelancaran lalu lintas da	0	
	gkapan Jalan merupakan perhitu		
	dengan satuan yang berbeda. Adap	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	ka Jalan;	un 9 (Sembha	ii) item dimaksud menputi.
	10 No. 10		
	abu Lalu Lintas;		
	k Lalu Lintas;		
	u Jalan;		
	ar Pengaman Jalan;		
	Penerangan Jalan;		
	pu Peringatan Pemakai Jalan;		
8. Alat	Pemberi Isyarat Lalu Lintas;		
9. Cerr	nin Tikungan.		
Jaring	an jalan nasional Berdasarkan KP	290/KPTS/M/	2015.
100	ER DATA		
	PENGELOLA TRANSPORTASI DAR	AT KELAS II S	UMATERA SELATAN
CARA	MENGHITUNG		
IKK 3.1 =	Jumlah pemenuhan item perlengkapan jalan yang terpa: Jumlah total item perlengkapan jala:	sang di Prov. Sumsel (d n (dengan satuan berbe	engan satuan berbeda) rda) x100%
SATUA	N		
	tase (%)		
	IGGUNG JAWAB		
BALAI	PENGELOLA TRANSPORTASI DAR	AT KELAS II S	UMATERA SELATAN

	INFRASTRUKTU	R KONEK	TIVITAS
	KEG	IATAN	
	KESELAMATAN DAN KEAMA	ANAN TRA	NSPORTASI DARAT
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA			IKATOR KINERJA KEGIATAN
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada
Transportasi Darat			UPPKB Ditjen Perhubungan
			Darat
DEFIN	NISI		

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan persentase perbandingan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dengan jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat di dalam UPPKB.

SUMBER DATA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

CARA MENGHITUNG

 $IKK~3.2 = \frac{Jumlah~kendaraan~barang~yang~melakukan~pelanggaran~kelebihan~muatan~di~UPPKB}{Jumlah~kendaraan~yang~masuk~di~UPPKB} x 100\%$

Jumlah pelanggaran kelebihan muatan dilaporkan per bulan dan persentase pelanggaran per tahun dihitung rata-rata dari persentase pelanggaran kelebihan muatan per bulan

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

	INFRASTRUKTU	R KONEK	TIVITAS
	KEG	IATAN	
	KESELAMATAN DAN KEAMA	ANAN TRA	NSPORTASI DARAT
	SASARAN KEGIATAN	INDI	KATOR KINERJA KEGIATAN
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang
	Transportasi Darat		tersosialisasi tentang
			keselamatan transportasi jalan

DEFINISI

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumsel.

SUMBER DATA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

CARA MENGHITUNG

IKK 3.5 =

Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada PNKJ pada tahun (n)

SATUAN

Orang

PENANGGUNG JAWAB

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
		KEGI	ATAN		
	KESE	LAMATAN DAN KEAMA	NAN TRA	NSPORTASI DARAT	
	SASARA	N KEGIATAN	IND	IKATOR KINERJA K	EGIATAN
SK 4	Meningkatn	ya Kinerja Pelayanan	IKK7a	Persentase standa	risasi
	Transportas	si Darat		pengujian berkala bermotor	kendaraan
DEFIN	IISI				
Stand	arisasi peng	ijian berkala kendaraa	n bermo	tor adalah pember	an akreditasi
Unit F	elaksana Uji	Berkala Kendaraan Be	rmotor (U	PUBKB) sesuai der	igan Perdirjen
		J.502/DRJD/2020. Pe	22.0	(2)	170
		or merupakan persenta			
		n Bermotor (UPUBKI			
		maupun swasta sampa	, -		
_		h Daerah Indonesia d			
= :		tor (UPUBKB) milik sw			
		merintah Kota, dan Selu			ing annunsua
	ER DATA	nermitan Kota, dan Sere	ar dir i cili	crintair Kabupateri.	
		A TRANSPORTASI DARA	T EEL AC	H CHIMATEDA CEL	ATANI
	MENGHITUN		II KELAS	II SUMATERA SEL	ATAN
IKK 4.	$6 = \frac{Jumlah\ UPUB}{}$	KB Pemda dan Swasta (APM) yan Pemda (DKI Jakarta + Kota + Kal	g lulus akredi	tasi sampai dengan tahun n	X 100%
	Jumlah	Pemda (DKI Jakarta + Kota + Kal	b)+ Jumlah l	IPUBKB Swasta (APM)	
SATU	AN				
	ntase (%)				
PENA	NGGUNG JAY	WAB			
BALAI	PENGELOLA	A TRANSPORTASI DARA	AT KELAS	II SUMATERA SEL	ATAN

PRO	GRAM
INFRASTRUKTU	R KONEKTIVITAS
KEG	IATAN
KESELAMATAN DAN KEAMA	ANAN TRANSPORTASI DARAT
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SK 4 Meningkatnya Kinerja Pelayanan	IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas
Transportasi Darat	keselamatan alur pelayaran SDP
DEFINISI	SDF
Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentan	g Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur
	an danau, muara sungai, alur yang
	tara muara sungai yang merupakan satu
	ng dari segi kedalaman, lebar dan bebas
hambatan pelayaran lainnya dianggap am	ian dan selamat untuk dilayari.
SUMBER DATA	
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DAR	AT KELAS II SUMATERA SELATAN
CARA MENGHITUNG	
IKK 3.7 = Jumlah fasilitas keselamatan alur	pelayaran yang terbangun s.d tahun (n)
SATUAN	
Lokasi (Kabupaten/Kota)	
PENANGGUNG JAWAB	
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DAR	AT KELAS II SUMATERA SELATAN

PROGRAM						
PROGRAM						
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
	KE	EGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPO			RTASI DARAT			
	SASARAN KEGIATAN	IND	KATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 5	Meningkatnya Kualitas	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan			
Penyelenggaraan Dukungan			dukungan teknis transportasi			
	Teknis Transportasi Darat		darat			
STITTE						

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan dispilin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasaan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

SUMBER DATA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

CARA MENGHITUNG

NO		URAIAN	вовот	NILAI
A	Ket	tepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		
	2	Perjanjian Kinerja	5%	
	3	pengisian input e-planning	5%	
	4	pengisian input e-performance	5%	
В	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
	2	Kompetensi	10%	
	3	Kinerja	8%	
	4	Disiplin	1%	
C	Tin	gkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	
D	Ind	leks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	

SATUAN

Vilai

PENANGGUNG JAWAB

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

PROGRAM			
	TIVITAS		
	KEGI	ATAN	
	PENUNJANG TEKNIS T	TRANSPO:	RTASI DARAT
	SASARAN KEGIATAN	IND	KATOR KINERJA KEGIATAN
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen	va Birokrasi Ditjen IKK1 Tingkat Penyelenggaraan	
	Perhubungan Darat		Perkantoran Ditjen
			Perhubungan Darat

DEFINISI

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

SUMBER DATA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

CARA MENGHITUNG

- 1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
- 2. Indikator Kinerja diukur melalu nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
- 3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO		URAIAN	вовот	NILAI
A	Ti	ngkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	1.5	
	2	Rata-rata turgkat kepuasan Pejabat Esekin iV	10	
В	Tingkat Kepuasan Staf		25%	
С	Ti	ngkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
	1	Tingkat Kriersedinafi Fasiinas Mejardini Kürsi	20	
		(mile) sy		
	2	Tingka: Kelesedraan Fastitus PU/Laptop (nilai v)	13	
	3	Tingkat Kelersedisaa Pasittas litternet toilai z	15	

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
- B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;
- C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:
 - 1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi $x = \frac{Jumlah \ Kursi \ dan \ Meja \ di \ Kantor}{Jumlah \ Pegawai \ (Pejabat \ dan \ Staf)} x 100\%$
 - 2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop Jumlah PC atau Laptop di Kantor
 - $y = \frac{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor} x100\%$

 - 3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet $z = \frac{Rata rata\ kecepatan\ Internet\ (Unduh)\ di\ Kantor^{**}}{Standar\ Kecepatan\ Internet\ (Unduh)\ di\ Kantor^{***}} x 100\%$

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai -

Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

- **) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurang nya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
- ***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

a Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Selatan

Michels Adlan, S.T.,M.M. 19790205 200604 1 002

